

## STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI PULAU BALI (Studi Kasus Program Utari Pertamina (Persero) Dppu Ngurah Rai)

**Muhson Arifin**

*Corresponding Author*

PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, Bali  
arifin.muhson@gmail.com

**Muhammad Hartato**

PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, Bali

**Yusnur Rainday Ahmad**

PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, Bali

**Dhita Hardiyanti Utami**

PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, Bali

**Ahsani Paramitasari**

PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, Bali

### ABSTRAK

Pulau Bali yang dikenal sebagai *the last paradise in the world*, merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Indonesia bahkan di mancanegara. Namun banyaknya kunjungan wisatawan juga memiliki dampak buruk, khususnya terjadinya penyempitan lahan hijau, peningkatan populasi, serta ancaman kepunahan binatang endemik. Hal yang menarik untuk dikaji yaitu adanya program UTARI yang berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui program pemberdayaan petani. Oleh karena itu peneliti tertarik dalam mengkaji lebih dalam terkait strategi serta pelaksanaan program UTARI dalam pemberdayaan masyarakat petani di tengah Kota Denpasar untuk mengatasi masalah permasalahan lahan serta permasalahan lainnya. Tulisan ini ditulis dengan berdasarkan pada penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Tulisan membahas strategi serta pelaksanaan program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai yang bernama "Eco-Edu Tourism Uma Lestari" sebagai upaya pencegahan dan penanganan dampak negatif dari keberadaan pariwisata di Bali. Program ini dilaksanakan di kawasan persawahan yang semakin sempit di Desa Peguyangan yang berada di Kota Denpasar. Terdapat 3 sub program yang dilaksanakan dalam program ini, yaitu eduwisata agrikultur, konservasi jalak bali, dan integrated farming system. Eduwisata agrikultur disusun dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan penyempitan lahan hijau di Kota Denpasar, Konservasi jalak bali disusun untuk menjaga dan melindungi jalak bali yang terancam punah, dan Integrated farming system dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dari kelompok sasaran yang merupakan petani dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ketiga sub program tersebut disusun saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

**KATA KUNCI:** Alam, Masyarakat, Pemberdayaan, Keberlanjutan, Jalak Bali

### ABSTRACT

Bali Island that known as *the last paradise in the world*, is one of the most famous tourism destination in Indonesia. But, tourist visits has a bad impact on the surrounding environment, especially reduced green land, increased population, and also endemic animal endangered. The existence of the UTARI program which seeks to solve these problems through farmer empowerment program is interesting to be studied. Therefore, researchers are interested in studying more deeply the strategy and implementation of the UTARI program in empowering farming communities in the middle of Denpasar City to overcome land acquisition and other problems. This paper is written based on descriptive research conducted using a qualitative approach, with data collection using the method of observation, interviews and documentation study. The focus of this paper is the implementation of PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai's CSR program called "Eco-Edu Tourism Uma Lestari" as an effort to prevent and handle the negative impacts of tourism in Bali. This program is implemented in Peguyangan Village, Denpasar City. There are 3 sub-programs implemented in this program, namely agricultural education, Bali starling conservation, and an integrated agricultural system. Agricultural edu tourism is designed to solve the narrowing green fields in Denpasar. Bali starling conservation is designed to increase the population of endangered bali starlings. And the Integrated farming system is a sub program aimed at developing the potential of the farmers in order to maximize land use. The 3 sub programs are synergized each other to gain optimum result for sustainable social and economic impact.

**KEYWORDS:** Natural, Endangered, Community, Development, Sustainability, Starling

## PENDAHULUAN

Lahan merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik sebagai lokasi tempat tinggal, persediaan kebutuhan pangan, maupun matapencahariannya. Peningkatan jumlah populasi serta peningkatan kebutuhan hidup manusia menyebabkan penggunaan lahan yang semakin meningkat sehingga terjadilah alih fungsi lahan. Penyebab alih fungsi lahan sawah secara umum dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu secara tidak langsung dan secara langsung (Winoto, 2016). Faktor tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi dan inkonsistensi impementasi tata ruang. Faktor langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah. Apabila tidak dikendalikan alih fungsi lahan ini dapat mendatangkan permasalahan yang serius, antara lain dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan (Iqbal, 2007).

Pulau Bali yang dikenal sebagai the last paradise in the world, juga mengalami permasalahan peralihfungsian lahan dikarenakan adanya peningkatan pembangunan dan peningkatan populasi akibat pariwisata. Rata-rata peralihfungsian lahan hijau di bali mencapai 800 ha/tahun (Lanya, 2014). Khususnya Kota Denpasar yang merupakan ibu kota Provinsi Bali, memiliki kepadatan penduduk yang terus meningkat dari data pada tahun 2010 sebanyak 6.210 jiwa/km<sup>2</sup> meningkat menjadi 7.410 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019, dengan laju pertumbuhan sebesar 19,43% dalam rentang waktu tersebut (BPS Kota Denpasar, 2020). Berdasarkan studi diagnosis penguasaan lahan sawah di Kota Denpasar (Sedana, 2013), penyebab utama terjadinya pengurangan luas lahan sawah produktif tersebut adalah adanya *land consolidation* (LC) untuk pengadaan infrastruktur dan sarana pelayanan umum (*public services*), pengembangan permukiman, serta perubahan lahan sawah menjadi “lahan tidur” (lahan tidak produktif) akibat keterbatasan sumberdaya air atau terganggunya sarana dan prasarana jaringan irigasi sebagai penyedia air irigasi dan/atau terbatasnya sumberdaya manusia yang mau menjadi petani. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berupaya mengendalikan alih fungsi lahan, dimana di dalamnya diatur mengenai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Privat dan Publik. Namun

peraturan tersebut masih belum efektif dikarenakan berdasarkan data pada tahun 2016 RTHK di Kota Denpasar mencapai 36,28% dari total luas wilayah dengan proporsi RTHK publik hanya 18,32% atau berkisar 2.341,48 Ha (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, 2016). Padahal seharusnya proporsi RTHK paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan rincian 20% diharuskan menjadi RTH publik dan 10% lainnya RTH privat (Joga & Ismaun, 2011).

Selain dari permasalahan alih fungsi lahan, juga terdapat permasalahan lain di Kota Denpasar yaitu terkait kelangkaan burung jalak bali dan kesejahteraan petani. Burung jalak bali diketahui disebutkan mendapatkan status “*Critically Endangered*” dalam *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* dan termasuk dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)* (Rasmussen, 2004). Data terakhir tahun 2016 yang telah dirangkum dalam buku statistik TNBB populasi Jalak Bali hanya tersisa 82 ekor (Ardhana & Rukmana, 2017). Adapun terkait kesejahteraan petani yaitu petani memiliki hubungan patron-klien dengan tengkulak yang cenderung merugikan petani. Bahkan hubungan keterikatan antara petani dan tengkulak dianggap sebagai salah satu akar Penyebab Kemiskinan Petani (Hasanuddin et al., 2009). Kondisi petani yang seringkali mengalami kerugian atas pola hubungan tersebut kemudian juga menyebabkan banyak anak petani yang beralih profesi menjadi karyawan perusahaan atau di pariwisata. Berdasarkan data selama tahun 1983–2003 komposisi pekerja sektor pertanian mengarah kepada dominasi petani tua dan menurunnya proporsi petani muda di sektor pertanian (Susilowati, 2016). Tanpa adanya penerus di bidang pertanian, maka akan meningkatkan potensi peralihfungsian lahan sawah milik petani.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Oleh karena itu “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Rosmedi & Riza Risyanti, 2006). Pemberdayaan masyarakat ditekankan pada pemberdayaan manusia yang diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia terutama pada masyarakat desa (Awang, 2010). Selain itu pemberdayaan juga dapat diartikan

sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan (Mardikanto & Soebiato, 2015). Dalam mengatasi permasalahan di Kota Denpasar yang cukup kompleks, PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai berupaya untuk membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program CSR bernama “Program Eco-Edu Tourism Uma Lestari (UTARI)”. Program ini dilaksanakan di Desa Adat Peguyangan di Kota Denpasar, dimana di Desa ini terdapat sebuah kawasan persawahan yang bernama Subak Sembung dengan luas mencapai 115Ha. Program UTARI berupaya untuk dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta membantu memberdayakan petani dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Melalui penelitian ini akan dikaji mengenai strategi serta pelaksanaan program UTARI yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai. Hal ini dikarenakan program tersebut merupakan program pemberdayaan yang berupaya menciptakan dampak keberlanjutan untuk penyelesaian permasalahan di Desa Adat Peguyangan.

**METODE**

Tulisan ini ditulis berdasarkan pada penelitian studi kasus yang dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian studi kasus ini dilakukan dikarenakan fokus penelitian, yaitu program Eco Edu Tourism Uma Lestari (UTARI) yang merupakan program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, memiliki keunikan dalam upaya pencegahan alihfungsi lahan. Jika pada umumnya program pencegahan alihfungsi lahan dilakukan hanya melalui kegiatan sosialisasi, PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai berupaya mengatasi alihfungsi lahan melalui penyelesaian masalah dasar petani yaitu permasalahan ekonomi. Program UTARI ini sendiri dilaksanakan di kawasan hijau di tengah perkotaan yaitu Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Provinsi Bali, tepatnya berada di Subak Sembung Desa Adat Peguyangan, Kota Denpasar, Bali.

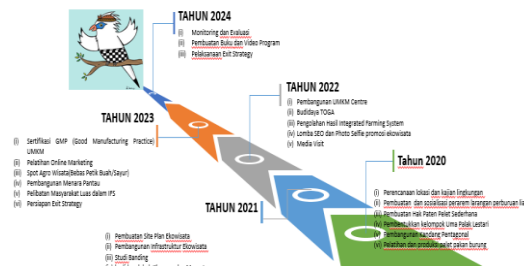
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Subak Sembung yang menjadi lokasi dilaksanakannya program UTARI. Wawancara dilakukan terhadap 12 orang responden yang berasal kelompok Uma Palak Lestari, Subak

Sembung, serta karyawan PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai. Responden tersebut dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana dengan dilakukannya pemilihan responden dari institusi dan masyarakat terkait diharapkan dapat memperoleh data yang lebih holistik serta dapat meningkatkan akurasi data. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan melalui pengkajian dokumen-dokumen pelaksanaan program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai. Data yang terkumpul dalam penelitian akan dilakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, dan diuji keabsahannya dengan melakukan triangulasi data.

**A. HASIL**

Pelaksanaan program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai dalam program Eco-Edu Tourism Uma Palak Lestari (UTARI) di Desa Adat Peguyangan merupakan penerapan dari Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Program UTARI telah dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perencanaan ini tercantum dalam dokumen rencana strategis program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai.

Gambar 1. Rencana Strategis Program



Sumber: Dokumen Rencana Strategis, 2020

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis, PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat “Program UTARI” di Desa Adat Peguyangan telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat dibagi menjadi 4 kategori pelaksanaan program, yaitu (1) Pembentukan Kelompok, (2) Capacity Building, (3) Pembangunan Infrastruktur, dan (4) Stakeholder Engagement. Berikut merupakan hasil analisis temuan lapangan mengenai keempat kategori

kegiatan yang telah dilakukan dalam program UTARI sejak 2020-2021:

#### 1. Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok Uma Palak Lestari merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai. Kelompok ini dibentuk sebagai kelompok pelaksana program UTARI. Jumlah anggota yang tergabung di dalam kelompok ini yaitu sebanyak 12 orang anggota, dengan diketuai oleh I Wayan Sukadana. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kelompok secara rutin berkumpul pada hari minggu di Subak Sembung, baik untuk mendiskusikan pelaksanaan program maupun untuk produksi pelet. Hasil wawancara dengan I Wayan Sukadana sebagai ketua kelompok, menunjukkan bahwa kelompok secara aktif memberikan masukan terkait pelaksanaan program, dan secara aktif membantu pelaksanaan program seperti pembuatan daya tarik wisata, konservasi jalak bali, serta produksi pelet untuk pakan burung.

#### 2. Capacity Building

Capacity building merupakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas skill dari kelompok sasaran. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, misalnya pelatihan perawatan burung jalak bali, pelatihan produksi pelet, pelatihan pemasaran pelet, serta pelatihan lainnya seperti budidaya maggot. Made Yogi sebagai salah satu anggota kelompok menyatakan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai telah dilakukan sejak dibentuknya kelompok pada bulan agustus 2020. Lokasi pelatihan yang dilakukan yaitu di Subak Sembung, tepatnya berada di munduk Palak yang menjadi lokasi konservasi jalak bali.

#### 3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada program UTARI ditujukan sebagai sarana penunjang program. Adapun pembangunan yang telah dilakukan yaitu pembangunan kandang konservasi jalak bali, pembangunan lokasi produksi pelet,

pembangunan kandang budidaya maggot, serta pembangunan sarana penunjang wisata seperti gerbang wisata dan daya tarik wisata lainnya. I Wayan Suwiry sebagai anggota kelompok uma palak lestari dan juga sebagai pengelola ekowisata Subak Sembung menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan keindahan wisata. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merusak kondisi keindahan alam persawahan di Subak Sembung, serta dapat menjadi daya tarik wisata baru bagi pengunjung.

#### 4. Stakeholder Engagement

Stakeholder Engagement merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai dalam rangka menjalin sinergi pelaksanaan program dengan stakeholder lainnya. Adapun hasil dari stakeholder engagement yang dilakukan yaitu dengan adanya sinergi pelaksanaan program dengan Tim Penanganan Akses Reformasi Agraria yang merupakan tim gabungan dari dinas-dinas terkait dalam pengembangan kawasan Kelurahan Peguyangan. Selain itu juga terdapat sinergi dengan Desa Adat dalam penerbitan hukum adat yang bernama awig-awig, dalam mengatur masyarakat untuk tidak melakukan perburuan liar di Subak Sembung. I Made Darayasa sebagai ketua/Pekaseh dari Subak Sembung juga menyatakan bahwa subak sembung telah bersinergi dengan PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai dari awal pelaksanaan program.

Data temuan lapangan juga menunjukkan bahwa selain kategorisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai diatas, dalam pelaksanaannya program UTARI juga memiliki 3 buah sub program. Ketiga sub program tersebut disusun berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai melalui kegiatan Focus Group Discussion bersama kelompok. Ketiga sub program yang menjadi bagian dari program UTARI tersebut antara lain (1) Wisata Edukasi Agrikultur yang disusun berdasarkan permasalahan kesejahteraan petani dan alih fungsi lahan, (2) Konservasi Jalak

Bali yang disusun berdasarkan permasalahan kelangkaan jalak bali di Pulau Bali, (3) Integrated Farming System yang disusun berdasarkan potensi masyarakat petani serta adanya permasalahan sampah organik di sekitar Peguyangan.

## PEMBAHASAN

### Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan salah satu tindakan perusahaan yang dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak sosial dan lingkungan akibat usahanya. Konsep CSR ini pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa, "*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*" (Ismail, 2014). Pelaksanaan CSR sendiri merupakan penerapan dari Tripple Bottom Line yang dicanangkan oleh John Elkinton. John Elkinton menyebutkan bahwa jika perusahaan ingin memiliki usaha yang berkelanjutan, selain berorientasi terhadap keuntungan (Profit) perusahaan juga harus turut berkontribusi positif terhadap masyarakat (People) dan lingkungan (Planet) (Alhaddi, 2014). Pelaksanaan CSR juga berperan penting dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGS) dan ISO26000. Program CSR yang saat ini telah berkembang tidak hanya mengacu pada penanganan dampak lingkungan namun juga pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan program CSR perusahaan perlu untuk memperhatikan poin-poin yang terdapat dalam SDGS.

Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa aturan terkait pelaksanaan CSR oleh perusahaan sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, CSR disebutkan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Dalam undang-undang ini diatur bahwasanya setiap perusahaan yang usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, maka diwajibkan untuk melaksanakan CSR. Dalam pasal 74 undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan CSR sendiri bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan pasal 74 tersebut kemudian diperjelas dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tidak hanya itu, terdapat sejumlah regulasi lain yang turut mengatur mengenai CSR, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selain itu sebagai bentuk dalam pengawasan, Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melakukan kegiatan penilaian perusahaan (PROPER) yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam penilaian ini perusahaan dikategorikan dalam 5 kategori ketaatan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Kategori hitam untuk perusahaan yang tidak patuh dan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan, kategori merah untuk perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan namun sudah berusaha untuk melakukan perbaikan, kategori biru untuk perusahaan yang telah patuh dan tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Adapun kategori hijau dan emas merupakan kategori beyond compliance, dimana perusahaan sudah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik di masyarakat. Khususnya untuk kategori emas, perusahaan harus dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di masyarakat melalui program CSR nya agar dapat dimasukkan dalam kategori emas tersebut.

PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai merupakan salah satu perusahaan yang pernah mendapatkan kategori hijau dan emas dalam penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PROPER). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan usahanya, PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai memiliki komitmen tidak hanya dalam meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, melainkan juga dalam berkontribusi melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Terdapat 5 program utama yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai dalam CSR nya, antara lain Program pemberdayaan masyarakat bisu-tuli di Desa Bengkala, program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Kelan, program pemberdayaan kelompok masyarakat penderita HIV/AIDS di

Kabupaten Badung, Program pencegahan penyebaran Narkoba dan obat-obatan terlarang di Desa Kedonganan, serta program penyelamatan lingkungan melalui ekowisata di Desa Peguyangan dengan nama program Eco-Edu Tourism uma lestari.

### **Hubungan Antar Sub Program Dalam Penyelesaian Permasalahan**

Program Eco-Edu Tourism Uma Lestari (UTARI) merupakan salah satu program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Desa Adat Peguyangan, Kota Denpasar. Penyusunan program ini dilakukan dengan didasarkan pada potensi dan permasalahan yang terdapat di Desa Adat Peguyangan. Untuk dapat mengetahui potensi dan permasalahan secara holistik, masyarakat turut secara aktif dilibatkan dalam perencanaan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Pelibatan masyarakat dalam perencanaan ini dikarenakan masyarakat lokal dianggap lebih mengetahui kondisi di wilayahnya sehingga dapat memberikan lebih banyak data yang akan digunakan dalam perencanaan program. Pola perencanaan tersebut dapat disebut sebagai perencanaan partisipatif dan juga perencanaan bottom up. Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang memasukkan adanya pembagian peran antara masyarakat atau kelompok dengan pemerintah dalam suatu perencanaan (Sumarto, 2009). Adapun tujuan dari perencanaan partisipatif adalah untuk mengikutsertakan masyarakat di dalamnya suatu perencanaan secara langsung atau tidak langsung (Alexander Abe, 2005). Sedangkan perencanaan bottom-up merupakan perencanaan yang bersumber dari masyarakat. Hjern menjelaskan bahwa Perencanaan bottom-up memberikan ruang bagi para implementator untuk dapat menyesuaikan strategi yang direncanakan dengan kondisi riil yang dihadapi (Ekowati, 2008). Perencanaan bottom-up ini merupakan kebalikan dari perencanaan top down yang dalam perencanaannya tanpa harus mendengarkan aspirasi masyarakat (Ahmad Sururi, 2015).

Hasil dari Focus Group Discussion diketahui bahwa Desa Adat Peguyangan, khususnya di kawasan Subak Sembung memiliki banyak potensi serta permasalahan. Permasalahan yang dapat ditemukan yaitu adanya alih fungsi lahan, kesejahteraan petani yang kurang, peralihan profesi anak petani, serta yang menjadi permasalahan umum di pulau bali yaitu kelangkaan burung jalak bali. Adapun potensi yang dimiliki yaitu adanya lahan

persawahan yang cukup luas sebesar 115Ha, banyaknya petani bunga yang menanam bunga di kawasan subak sembung, serta adanya potensi sinergitas dengan pemerintah dan private sector lainnya dalam pelaksanaan program. Sebagai hasil perencanaan dari FGD tersebut maka disusunlah 3 buah sub program dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ditemukan, yaitu Wisata Edukasi Agrikultur, Konservasi jalak bali, dan Integrated Farming System.

Sub program Wisata Edukasi Agrikultur merupakan sub program yang memiliki lingkup cukup luas karena berkaitan dengan dua sub program yg lainnya, yaitu konservasi jalak bali dan integrated farming sistem. Hal ini dikarenakan kedua sub program tersebut juga berfungsi sebagai daya tarik wisata serta media edukasi yang akan disampaikan kepada wisatawan. Sub program ini disusun sebagai sebuah solusi atas permasalahan alih fungsi lahan serta kesejahteraan petani. Dengan dijadikannya kawasan subak sembung sebagai kawasan wisata edukasi agrikultur, masyarakat dihimbau untuk dapat menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan alih fungsi lahan dikarenakan alih fungsi lahan akan berdampak kepada hilangnya daya tarik wisata lokasi tersebut. Lokasi persawahan yang berada di tengah perkotaan merupakan daya tarik utama dari Subak Sembung tersebut. Melalui adanya wisata ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dikarenakan petani dapat secara langsung menjual hasil panennya kepada wisatawan. Petani yang sebelumnya tidak dapat menentukan harga dalam memasarkan hasil pertaniannya akibat masalah akses pasar dan keberadaan tengkulak yang sering memperlmainkan harga, dengan adanya Sub Program ini dapat menciptakan sebuah pasar baru untuk produk hasil panennya. Peningkatan kesejahteraan petani tersebut diharapkan dapat mengurangi alasan petani untuk menjual lahan sawahnya, dikarenakan salah satu alasan petani menjual lahan adalah dikarenakan kebutuhan biaya hidup (Nuhung, 2015). Tujuan selanjutnya dari sub program wisata edukasi agrikultur yaitu sebagai edukasi, dimana wisatawan diberikan edukasi terkait pertanian serta pentingnya keberadaan lahan hijau.

Konservasi jalak bali merupakan sub program yang dirancang dalam rangka mengatasi permasalahan kelangkaan burung jalak bali. Sudah terdapat beberapa aturan terkait perlindungan satwa yang terancam punah di Indonesia, misalnya Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, serta Peraturan

Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Flora dan Fauna Indonesia. Untuk dapat mendukung upaya perlindungan satwa tersebut maka dilakukanlah kegiatan konservasi yang selain bertujuan untuk melindungi satwa juga membantu dalam pengembangbiakan satwa agar tidak punah. Telah banyak dilakukan konservasi satwa langka baik secara in-situ di dalam habitat aslinya maupun secara ex-situ di luar habitat alamnya melalui penangkaran (Takandjandji & Mite, 2016). Konservasi jalak bali yang dilakukan dalam program UTARI merupakan replikasi dari program konservasi jalak bali di Desa Sibangkaja yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT Pertamina(Persero) DPPU Ngurah Rai. Konservasi jalak bali di Desa Sibangkaja tersebut sudah berhasil sukses mengembangbiakkan jalak bali sebesar 190% dari 18 ekor menjadi 52 ekor dalam waktu 5 tahun. Oleh karena itulah pada tanggal 30 September 2020 dilakukan kegiatan replikasi program di Desa Adat Peguyangan, dengan memindahkan 8 ekor jalak bali dari Desa Sibangkaja ke Kandang Konservasi di Kawasan Subak Sembung Desa Adat Peguyangan.

Kelompok sasaran pelaksanaan program yaitu kelompok uma palak lestari yang dibentuk dari masyarakat petani sekitar bekerjasama dengan subak sembung dan desa adat. Kelompok diberikan pelatihan terkait konservasi dan pemeliharaan burung jalak bali agar dapat melakukan perawatan secara optimal. Selain itu, kelompok juga diberikan pelatihan dalam produksi pelet untuk memenuhi kebutuhan pakan jalak bali. Kelompok telah mampu untuk melakukan produksi pelet secara rutin dengan hasil produksi sebanyak 7Kg per minggu. Salah satu inovasi yang dilakukan dalam produksi pelet yaitu pembuatan komposisi pelet baru dengan berbahan baku cangkang kepiting. Inovasi ini merupakan integrasi dari program UTARI dengan program CSR di lokasi lainnya bernama Kampung Kepiting, dimana limbah cangkang kepiting di lokasi program tersebut tidak termanfaatkan dengan baik. Inovasi tersebut juga telah dibakukan dan mendapatkan hak paten sederhana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor paten IDS000003022.

Selain diberikan pakan hasil dari produksi pelet yang dilakukan oleh kelompok uma palak lestari, burung jalak bali di kandang konservasi juga diberikan makanan tambahan lain untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisinya. Adapun makanan tambahan tersebut antara lain jangkrik dan cacing yang dapat membantu meningkatkan protein hewani, serta buah-buahan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan buah-buahan untuk pakan jalak bali

tersebut kelompok bekerjasama dengan pedagang buah di pasar tradisional terdekat terkait pemanfaatan buah sisa penjualan. Buah-buahan yang terjual di pasar yang biasanya dibuang, disisihkan untuk diberikan ke kandang konservasi sebagai pakan burung. Namun tidak semua buah akan diterima sebagai pakan burung jalak bali, kelompok uma palak lestari menetapkan standar untuk buah yang dapat digunakan sebagai pakan burung jalak bali yaitu buah yang masih utuh dan tidak busuk. Baik kelompok uma palak lestari maupun pedagang buah menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kelompok uma palak lestari dapat memperoleh pakan burung secara cuma-cuma, sedangkan pedagang buah dapat menyelesaikan permasalahan sampahnya. Meskipun demikian data menunjukkan bahwa tidak semua buah yang terkumpul di konservasi jalak bali dapat habis digunakan sebagai pakan burung jalak bali. Melalui kerjasama tersebut kelompok uma palak lestari dapat memperoleh buah minimal sebanyak 5Kg per minggu, namun kebutuhan riil dari pakan jalak bali maksimal 2Kg. Hal ini menyebabkan diperlukannya sebuah solusi baru, yaitu dari mulai pembatasan jumlah buah yang diterima oleh kelompok Uma Palak Lestari serta pemanfaatan buah-buahan yang tidak terpakai dalam kegiatan budidaya maggot. Budidaya maggot tersebut kemudian menjadi salah satu bagian dari sub program Integrated Farming System.

Sub program Integrated Farming System (IFS) merupakan sub program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat sasaran program yang mayoritasnya merupakan petani. Fokus utama dari sub program ini yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang saling terintegrasi. Selain itu konsep Integrated Farming System juga diharapkan dapat menjadi salah satu media edukasi, yaitu untuk memperkenalkan sebuah konsep baru mengenai pertanian terintegrasi sehingga dapat menarik minat masyarakat di bidang pertanian. Dalam sub program ini terdapat beberapa kegiatan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, antara lain budidaya maggot, budidaya lebah madu, dan pertanian organik. Budidaya maggot merupakan salah satu solusi yang dicanangkan untuk mengurangi timbulan sampah organik, baik dari sisa panen, sisa pakan burung jalak bali, serta sisa dari sampah rumah tangga. Budidaya maggot juga dikenal dengan nama budidaya lalat BSF (Black Soldier Fly) dikarenakan maggot pada dasarnya

merupakan larva dari lalat BSF. Maggot juga dikenal sebagai pengurai sampah organik yang efektif dan dikenal memiliki kemampuan biokonversi limbah organik yang tinggi yaitu dapat mengurangi limbah sebesar 52%-56% (Salman et al., 2019). Adapun dari segi nutrisi, maggot memiliki kandungan protein yang tinggi dapat mencapai 40% - 50% dengan kandungan lemak berkisar 29% - 32% (Bosch et al., 2014). Oleh karena itu maggot banyak digemari masyarakat sebagai pakan ternak dikarenakan proteinnya yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangbiakan ternak. Hal ini juga menjadi salah satu alasan dari dilakukannya budidaya maggot, yaitu maggot dapat dimanfaatkan sebagai penambah nutrisi bagi burung jalak bali, serta dapat dijual sebagai pakan ternak untuk dapat meningkatkan pendapatan petani. Selain dari maggot sendiri, budidaya maggot juga dapat menghasilkan pupuk organik yang juga disebut sebagai kasgot (bekas maggot). Pupuk organik hasil dari budidaya maggot ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lainnya seperti pertanian organik ataupun penanaman bunga untuk budidaya lebah madu.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam sub program integrated farming system yaitu pertanian organik dan budidaya lebah madu. Dalam kegiatan pembuatan pertanian organik, pada dasarnya program memanfaatkan kelompok uma palak lestari yang memang berprofesi sebagai petani dan sudah memiliki lahan sawah. Dalam hal ini kelompok bersama dengan petani sekitar didorong untuk melakukan kegiatan pertaniannya secara organik dengan tidak menggunakan pupuk kimia. Sayuran organik diproduksi untuk menyediakan bahan pangan yang aman dikonsumsi bagi kesehatan serta tidak merusak lingkungan dalam jangka panjang (Pracaya, 2016). Selain itu alasan lain dilakukannya pertanian organik dikarenakan adanya Perubahan pola konsumsi produk sayuran konvensional ke produk organik yang mulai mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Peningkatan permintaan terhadap sayur dan buah organik ini diakibatkan oleh banyak konsumen percaya makanan organik lebih aman dan memiliki manfaat lebih besar (Shaharudin et al., 2010). Perubahan ini membuat tingkat konsumsi produk organik ikut meningkat yang implikasinya adalah meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk sayuran organik (Rasmikayati et al., 2020). Kemudian sayur dan buah hasil panen dari pertanian organik tersebut dapat dijual secara langsung oleh masyarakat kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata edukasi agrikultur di

Subak Sembung tersebut. Untuk dapat meningkatkan hasil pertanian tersebut juga dilakukan budidaya lebah madu, yaitu lebah klancheng (*Trigona Sp*). Diketahui bahwa penyerbukan yang dilakukan oleh *Trigona laeviceps* meningkatkan 141% jumlah polong per tanaman, 48% jumlah biji per polong, 204% bobot biji per tanaman, 177% perkecambahan biji (Wulandari et al., 2017). Selain itu alasan lain dilakukannya kegiatan budidaya lebah madu yaitu dikarenakan kawasan subak sembung yang di dalamnya banyak masyarakat menanam bunga di sawah, serta banyak ditanamnya bunga di jalur jogging track untuk memperindah kawasan wisata. Pemilihan lebah Klancheng juga dilakukan dikarenakan lebah ini dikenal tidak memiliki sengat sehingga tidak mengganggu burung jalak bali dan wisatawan yang datang berkunjung. Ukuran lebah *trigona* ini sangat kecil, sekitar 1-2 cm. Warnanya hitam dengan sayap bening (Hrncir et al., 2016). Hubungan saling keterkaitan antara kegiatan pertanian organik, budidaya maggot, dan budidaya lebah madu ini kemudian disebut sebagai Integrated Farming System (IFS).

Dampak pelaksanaan program dapat terlihat dalam beberapa aspek, misalnya dengan banyaknya jumlah pengunjung yang rata-rata mencapai 100-200 wisatawan per hari. Banyaknya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ini dikarenakan kondisi lahan persawahan yang masih hijau di tengah kawasan perkotaan menjadi lokasi menarik bagi masyarakat untuk melepas beban pikiran serta cocok menjadi lokasi untuk berolah raga. Terlebih untuk memasuki lokasi pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk datang. Adapun dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yaitu bahwa masyarakat dapat secara langsung menjual sayuran dan buah-buahan hasil panen sawahnya kepada wisatawan yang datang. Track wisata dibuat memutar dan mengelilingi kawasan subak sembung sehingga lebih banyak lahan sawah masyarakat yang terlewati oleh wisatawan. Masyarakat, khususnya kelompok uma palak lestari juga dapat memperoleh tambahan penghasilan melalui produksi pelet pakan burung serta kegiatan budidaya-budidaya yang dilakukan dalam sub program Integrated Farming System (IFS).

#### **Sinergitas Stakeholder**

Pelaksanaan program CSR perusahaan merupakan implementasi dari good governance, dimana *World Bank* menyebutkan bahwa terdapat tiga domain dari *governance* yang berperan dalam pembangunan, yaitu *state, private sector, civil*



*society* yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Abdullah, 2016). Good governance merupakan sebuah konsep yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam aspek pembangunan bukan hanya menjadi kewajiban dari pemerintah, melainkan juga kewajiban dari sektor privat dan masyarakat sipil. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan adanya sinergi yang baik antara ketiga sektor tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya sinergitas antar stakeholder dalam Program UTARI yang dilaksanakan di Desa Adat Peguyangan. Sebagai sebuah upaya untuk mendukung pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, program ini dilakukan dengan bersinergi bersama dengan perusahaan lain, pemerintah, serta organisasi masyarakat lokal.

Peran pemerintah dalam program UTARI yaitu melalui keterlibatan desa adat dalam mengatur masyarakatnya serta dibentuknya tim penanganan akses reforma agraria. Bali dikenal sebagai wilayah yang masih memegang kuat prinsip dan kebudayaan adatnya sehingga pengaruh desa adat di masyarakat cukup kuat. Desa Adat memiliki dua bentuk hukum adat yang ditaati oleh masyarakat yaitu awig-awig dan pararem. Awig-awig memiliki dasar kata “wig” yang artinya rusak, sehingga “awig” artinya tidak rusak atau baik. Jadi awig-awig dapat diartikan sebagai suatu hukum untuk menjadi baik. Secara harfiah awig-awig merupakan suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat demi mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (Surpha, 2002). Adapun pararem yaitu merupakan hasil keputusan bersama yang diperoleh dalam sebuah paruman/rapat adat, yang selanjutnya disepakati untuk dijalankan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan program UTARI, Pemerintah Desa adat Peguyangan turut berperan dalam membuat sebuah peraturan adat dalam bentuk awig-awig mengenai larangan perburuan liar khususnya untuk burung jalak bali yang mulai terancam punah. Dengan dibentuknya awig-awig tersebut masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan perburuan burung jalak bali sehingga dapat membantu pelaksanaan konservasi jalak bali yang dilakukan. Awig-awig dan pararem sendiri tidak dapat serta merta menjamin terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi dengan kesadaran masyarakat yang kuat terhadap hukum adat yang menyebabkan hukum tersebut dapat berjalan efektif. Kemampuan masyarakat dalam

menggunakan hukum adat sebagai landasan berinteraksi dalam pergaulan hidup dapat mencegah terjadinya konflik adat (Sirtha, 2008).

Pembentukan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria merupakan sebuah tim yang diinisiasi oleh Balai Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Tim ini dibentuk dengan BPN sebagai koordinatornya dan beranggotakan beberapa instansi pemerintahan lainnya seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dinas Pertanian Kota Denpasar, Dinas Perikanan dan Ketahanan Kota Denpasar, serta beberapa instansi pemerintahan terkait. Masing-masing instansi memiliki program yang bertujuan untuk pembangunan kawasan di Kelurahan Peguyangan serta meminimalisir alih fungsi lahan yang terjadi di lokasi tersebut. Dinas Pertanian Kota Denpasar berupaya membantu dalam pemeliharaan jalan usaha tani, serta memiliki program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) pada tahun 2022. Dinas Pariwisata Kota Denpasar berperan dalam melakukan pelatihan kepada pengelola wisata di Subak Sembung, serta membantu dalam pengembangan UMKM di sekitar lokasi wisata. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan kota Denpasar siap dalam mendukung program pemberdayaan petani melalui kegiatan budidaya minapadi yang dicanangkan oleh tim penanganan akses reforma agrarian, serta mendukung program Budidaya Maggot yang diselenggarakan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai. Selain itu juga terdapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang membantu dalam penyelesaian permasalahan sampah melalui program TPS 3R nya.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pembangunan dan pengembangan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun hal ini tidak membatasi sektor privat untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan. Bahkan mengacu pada Undang-undang nomor 40 tahun 2007, sektor privat dituntut untuk dapat turut berkontribusi dalam pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Sektor privat yang turut berperan dalam pelaksanaan program yaitu Astra Group Bali, Bank Mandiri KCP Renon, serta PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai. Ketiga perusahaan tersebut juga turut dilibatkan dalam rapat koordinasi Tim Penanganan Akses Reforma Agraria untuk dapat menciptakan sinergitas program lebih baik. Astra Group Bali berperan melalui program Banjar Berseri Astra yang telah dilaksanakannya di Banjar Pulugambang, Desa Adat Peguyangan,

Kelurahan Peguyangan, Denpasar. Keberadaan program Banjar Berseri Astra tersebut cukup membantu masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pengembangan kawasan wisata di Subak Sembung, Program Banjar Berseri Astra juga berperan dalam penataan lingkungan dan penanaman pohon di area pintu masuk dari wisata subak sembung Peguyangan. Hal ini dikarenakan pintu masuk kawasan wisata Subak Sembung merupakan bagian dari wilayah program Banjar Berseri Astra. Meskipun program Banjar Berseri Astra di Desa Adat Peguyangan tersebut telah berakhir, namun Astra Group Bali mendukung tim Penanganan Akses Reforma Agraria dalam pelaksanaan program di Peguyangan. Adapun Bank Mandiri Denpasar KCP Renon dalam rapat koordinasi Tim Penanganan Akses Reforma Agraria menyampaikan bahwa memiliki program yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di sekitar lokasi wisata, yaitu program bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai merupakan sektor privat yang berperan sebagai pencetus dan pendorong dalam pelaksanaan program Eco-Edu Tourism Uma Lestari (UTARI). Program UTARI yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai difokuskan pada Munduk Palak Subak Sembung. Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai tidak hanya terbatas pada dukungan finansial, namun juga melalui pendampingan kegiatan, penyusunan konsep program, serta pemberian pelatihan baik pelatihan pemeliharaan burung jalak bali maupun pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat dalam budidaya maupun manajemen wisata. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya melalui program UTARI ini diharapkan masyarakat petani dapat mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, serta dapat meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan.

Peran masyarakat sipil merupakan peran yang paling penting dalam pelaksanaan program. Dimana sinergitas antara sektor privat dan pemerintah tidak akan dapat menimbulkan dampak yang positif dan berkelanjutan di masyarakat tanpa adanya keterlibatan masyarakat sipil. Secara teoritis masyarakat sipil dapat diartikan sebagai perkumpulan merdeka yang membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat borjuis (Kukathas, 2004). Hal ini juga disebut oleh Ernest Gellner bahwa *civil society* adalah seperangkat institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan (Sufyanto, 2001). Dengan demikian masyarakat sipil

bukanlah masyarakat perorangan atau masyarakat umum, melainkan sekelompok masyarakat yang memiliki kekuatan dan membentuk sebuah institusi yang berperan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan konservasi ini masyarakat sipil direpresentasikan oleh kelompok uma palak lestari dan subak sembung.

Subak pada dasarnya merupakan suatu kelompok masyarakat hukum adat dengan karakteristik sosio-agraris religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola irigasi di lahan sawah. Anggota subak atau yang biasa disebut krama subak merupakan petani yang menggarap sawah dan mendapat bagian air untuk sawahnya. Subak sembung merupakan salah satu subak yang masih aktif hingga sekarang, dengan anggota sebanyak 199 anggota yang mengolah 115 hektar lahan sawah. Anggota tersebut kemudian dibagi menjadi 9 munduk atau tempek, yaitu munduk muani, munduk simper, munduk taman, munduk les, munduk sapian, munduk jaba kuta, munduk sembung, mundukumapan, dan munduk palak. Subak sembung inilah yang bersama dengan PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai menginisiasi berdirinya program eco-edu tourism uma lestari di wilayah Desa Peguyangan. Keterlibatan subak sembung dalam program tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari konsep Tri Hita Karana yang melandasi sistem subak. Secara tekstual Tri Hita Karana dapat diartikan sebagai tiga penyebab kesejahteraan (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Namun jika ditarik lebih luas Tri Hita Karana merupakan trilogi konsep hidup dimana Tuhan, manusia dan alam berdiri di masing-masing sudut sebagai unsur mutlak terselenggaranya denyut nadi alam raya (Suyastiri, 2012). Keterlibatan subak sembung dalam menginisiasi program eco-edu tourism uma lestari selain dari dalam proses perencanaan juga dalam pembentukan institusi baru yang menjadi pengelola program yaitu Kelompok Uma Palak Lestari.

Kelompok Uma Palak Lestari merupakan sebuah institusi baru yang dibentuk dalam pelaksanaan program UTARI. Kelompok ini beranggotakan 12 orang masyarakat petani yang merupakan bagian dari Munduk Palak Subak Sembung. Sebagai kelompok pelaksana program, kelompok ini berperan penting dikarenakan berperan langsung dalam aktivitas operasional program, dari mulai perawatan burung jalak bali, budidaya maggot dan lebah madu, serta pengelolaan kawasan wisata. Kelompok ini juga membantu dalam melakukan sosialisasi kepada pengunjung yang datang baik terkait pelestarian burung jalak bali

maupun terkait pengelolaan lahan hijau di Desa Peguyangan. PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai melalui program-programnya berupaya untuk dapat meningkatkan kapasitas skill kelompok dalam pelaksanaan program, dengan tujuan untuk sustainabilitas kelompok setelah masa program berakhir.

## PENUTUP

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai dalam Program UTARI telah dilaksanakan dengan cukup baik. Terdapat beberapa poin penting yang dilakukan dalam strategi menciptakan dampak keberlanjutan dari program UTARI, antara lain (1) adanya perencanaan roadmap jangka panjang selama 5 tahun pelaksanaan program, (2) pelibatan masyarakat petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, (3) sinergitas antar sub program untuk memaksimalkan dampak program, serta (4) inklusivitas program dengan adanya sinergi program bersama dengan institusi lain, baik dari institusi pemerintahan maupun institusi private sectore.

Meskipun pelaksanaan program UTARI baru berjalan selama 1 tahun, dampak sosial dan ekonomi program sudah mulai terlihat misalnya

dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan alam, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menerapkan sistem pertanian yang terintegrasi, serta adanya peningkatan perekonomian melalui produksi pelet. Dengan demikian sudah mulai terlihat adanya perubahan pola perilaku sosial-ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan pada umumnya alasan petani dalam menjual dan mengalihfungsikan lahannya dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi serta menurunnya jumlah petani dikarenakan terjadinya peralihan profesi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian lain yang terkait. Karena dalam penelitian ini banyak terdapat aspek yang dapat dikembangkan, antara lain kajian dari sisi ekonomi mengenai dampak program terhadap perekonomian masyarakat, dari segi budaya mengenai peran desa adat dan subak sembung dalam pelaksanaan program, dari segi sosial mengenai lahirnya institusi baru dan dampak sosial akan adanya program, serta dari segi pertanian mengenai pengoptimalan pemanfaatan lahan dalam integrated farming system. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam melakukan program CSR perusahaan

Ardhana, I. P. G., & Rukmana, N. (2017).

KEBERADAAN JALAK BALI

(*Leucopsar rothschildi* Stresemann 1912)

DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT.

*SIMBIOSIS*, 1.

<https://doi.org/10.24843/JSIMBIOSIS.2017.v05.i01.p01>

Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Desa*. Pustaka Pelajar.

Bosch, G., Zhang, S., Oonincx, D. G. A. B., & Hendriks, W. H. (2014). Protein quality of insects as potential ingredients for dog and cat foods. *Journal of Nutritional Science*, 3. <https://doi.org/10.1017/jns.2014.23>

BPS Kota Denpasar. (2020). *Kota Denpasar Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik.

Ekowati. (2008). Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program. In *Surakarta: Pustaka Cakra*. Pustaka Caraka.

Hasanuddin, T., G. D. G., & Endaryanto, T. (2009). Akar Penyebab Kemiskinan Petani Hortikultura di Kabupaten Tanggamus,

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65–72.

Ahmad Sururi. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25.

Alexander Abe. (2005). *Perencanaan daerah partisipatif* / Alexander Abe. Pondok Edukasi.

Alhaddi, H. (2014). The Influence of Triple Bottom Line on Strategic Positioning: An Exploratory Case Study on Differentiation through Image. *Journal of Management and Strategy*, 5(1). <https://doi.org/10.5430/jms.v5n1p55>

- Propinsi Lampung. *Agrikultura*, 20(3).  
<https://doi.org/10.24198/agrikultura.v20i3.947>
- Hrcir, M., Jarau, S., & Barth, F. G. (2016). Stingless bees (Meliponini): senses and behavior. *Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology*, 202(9–10), 597–601.  
<https://doi.org/10.1007/s00359-016-1117-9>
- Iqbal, M. & S. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 167-182*, 5(70), 167–182.
- Ismail. (2014). Implementasi Program Corporate Social Responsibility Terhadap Warga dan Lingkungan di Kelurahan Guntung (Studi Kasus Pada Departemen Humas PT Pupuk Kaltim) Ismail. *Paradigma*, 3. No.2, 223–235.  
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i2.1087>
- Joga, N., & Ismaun, I. (2011). *RTH 30%! resolusi [kota] hijau*.
- Kukathas, C. (2004). *Islam, Masyarakat Sipil, dan Ekonomi Pasar* (A. Yahya (ed.)). Fredrick Nauman Stiftung.
- Lanya. (2014). *Strategi Penentuan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Dalam Antisipasi Dampak Pariwisata di Bali*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Nuhung, I. A. (2015). Faktor-Faktor Yang Memotivasi Petani Menjual Lahan Dan Dampaknya Di Daerah Suburban. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(1), 17–33.
- Pracaya. (2016). *Bertanam 8 Sayuran Organik. Penebar Swadaya*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Rasmikayati, E., Saefudin, B. R., Karyani, T., Kusno, K., & Rizkiansyah, R. (2020). Analisis Faktor Dan Tingkat Kepuasan Ditinjau Dari Kualitas Produk Dan Pelayanan Pada Konsumen Sayuran Organik Di Lotte Mart Kota Bandung. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 351.  
<https://doi.org/10.25157/ma.v6i1.3219>
- Rasmussen, P. C. (2004). Threatened Birds of Asia: The BirdLife International Red Data Book Nigel J. Collar. In *The Auk* (Vol. 121, Issue 2). <https://doi.org/10.2307/4090426>
- Rosmedi, & Riza Risyanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprit Jatinegoro.
- Salman, N., Nofiyanti, E., & Nurfadhilah, T. (2019). Pengaruh dan Efektivitas Maggot Sebagai Proses Alternatif Penguraian Sampah Organik Kota di Indonesia. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(1).  
<https://doi.org/10.32672/jse.v5i1.1655>
- Sedana, G. (2013). *Studi Diagnosis Penguasaan Lahan Sawah di Kota Denpasar*. Kerjasamaantara Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar dan Pusat penelitian Universitas Dwijendra.
- Shaharudin, M. R., Pani, J., Mansor, S., & Elias, S. (2010). Factors Affecting Purchase Intention of Organic Food in Malaysia's Kedah State. *Cross-Cultural Communication*, 6(2), 105–116.
- Sirtha, I. N. (2008). *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*. Udayana University Press.
- Sufyanto. (2001). *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutik Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Pustaka Pelajar.
- Sumarto, H. S. (2009). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Hetifah Sumarto Sj; kata pengantar: Dr. In *Jim Schiller dan Dr. Hans Antlov*. Yayasan Pustaka Obor Indo.
- Surpha, I. M. (2002). *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*. Pustaka Bali Post.
- Susilowati, S. H. (2016). Fenomena Penuaan

Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 35.  
<https://doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.35-55>

- Suyastiri, N. M. (2012). Pemberdayaan Subak Melalui “Green Tourism” Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Pertanian di Bali. *Sepa*, 8(2), 168–173.
- Takandjandji, M., & Mite, M. (2016). Perilaku Burung Beo Alor di Penangkaran Oilsonbai, Nusa Tenggara Timur. *Buletin Plasma Nutfah*, 14(1), 43.  
<https://doi.org/10.21082/blpn.v14n1.2008.p43-48>
- Winoto. (2016). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), 167–182.  
<https://doi.org/10.21082/akp.v5n2.2007.167-182>
- Wulandari, A. P., Atmowidi, T., & Kahono, D. S. (2017). Peranan Lebah Trigona laeviceps (Hymenoptera: Apidae) dalam Produksi Biji Kailan (*Brassica oleracea* var. alboglabra). *Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)*, 45(2), 196.  
<https://doi.org/10.24831/jai.v45i2.13236>

## Lampiran Dokumentasi

### 1. Konservasi Jalak Bali

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai



### 2. Produksi Pelet

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai



3. Ekowisata

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai

